

STRUKTURASI KECURANGAN KENAIKAN PANGKAT DI SEKOLAH

Sulis Tiorini

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
Rini_sos@yahoo.com

Ardhie Raditya

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
Diditz.kristina@gmail.com

Abstrak

Kenaikan pangkat menjadi suatu hal yang penting dalam kesejahteraan hidup para pegawai negeri sipil terutama bagi guru. Namun banyak fenomena yang terjadi dalam proses kenaikan pangkat, seperti pemalsuan angka kredit dan kecurangan portofolio. Penelitian ini secara empiris menjawab mengenai bagaimana praktek kecurangan dalam proses kenaikan pangkat di Sekolah (Pangkat IVb pada Guru Sekolah Dasar di Desa X Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk). Pemilihan lokasi didasarkan observasi yang telah dilakukan bahwasannya dijumpai guru yang melakukan kecurangan dirental yang berada didesa X (disamarkan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi Kesadaran Kolektif Teori yang digunakan adalah fenomenologi kesadaran kolektif dari Peter L Berger dan Strukturasi dari Anthony Giddens. Praktek kecurangan ini dilakukan dengan memanfaatkan dominasi yang mereka miliki baik melalui sumberdaya *Alokatif* dan sumberdaya *Autoritatif*. Praktek kecurangan pangkat ini tentunya tidak dilakukan sendiri, namun terdapat kerjasama diantara para guru sehingga terdapat unsur pembenaran atau Legitimasi atas praktek yang dilakukan oleh para guru tersebut. Perilaku menyimpang guru ini dibagi menjadi dua yaitu menyimpang secara individu, dan menyimpang secara kolektif.

Kata kunci: Kenaikan Pangkat, Strukturasi Kecurangan, Guru di Nganjuk.

Abstract

The Raise of rank is an important thing in the welfare of civil servants especially for teachers. However many phenomenon happened in the promotion, as a counterfeit credit portfolio and fraud. This research empirically answer about how to fraud practice in the promotion of IVb in schools (The rank of IVb on elementary school teacher in the village X of Tanjunganom Subdistrict, district Nganjuk). Based on observation of the elections by teacher finds that commits iniquity rental are in Village x (marked). This study used qualitative methods with Collective Consciousness Theory Phenomenology approach used is phenomenology collective consciousness of Peter L Berger and Structuration by Anthony Giddens. This practice of fraud was made by exploiting their own dominance, through *alokatif* and *autoritatif* resources. This rank fraud practice is of course not alone however, there was cooperation between teachers so there was some justification or legitimacy of practice conducted by the teacher. Deviate behavior teacher is divided into two are distorted individually, and collectively deviate.

Keywords: Raise of Rank, Strukturasi Iniquity, Teachers in Nganjuk.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, agar mampu menjalani kehidupan secara lebih baik, baik dalam berinteraksi ataupun mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan menjadi salah satu faktor kemajuan pembangunan suatu Negara, karena semakin berkualitas sumberdaya manusia maka mereka mampu menciptakan berbagai hal yang bisa memberikan kontribusi besar bagi berbagai bidang yang menjadi unsur berkembangnya suatu negara seperti bidang ekonomi politik ataupun budaya.

Namun pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah bila merujuk dari beberapa laporan survey yang dilakukan oleh pihak luar negeri ataupun lembaga pendidikan negara kita sendiri yang menyatakan baik

pendidikan atau sumberdaya yang kita miliki jauh lebih rendah bila dibandingkan Negara lainnya, dalam *Human Development index* (HDI), terbukti pada tahun 2004 Indonesia masih menempati peringkat ke-111 dari 117 negara, tahun 2005 dari 110 peserta Indonesia menempati peringkat 108 dibawah Vietnam. Laporan *International education achievement* (IEA), menyatakan bahwa kemampuan membaca siswa sekolah dasar Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara. Sedangkan mutu akademik antarbangsa melalui *Programme For International Student Assessment (PISA)* tahun 2003 dari 41 negara peserta yang telah disurvei untuk bidang IPA Indonesia menempati peringkat 38, sementara untuk bidang matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat 39. Laporan dari *World Competitiveness Yearsbook* tahun 2000, daya saing sumberdaya Indonesia berada posisi ke 46 dari 47 negara. (Kunandar, 2011: 2) Sedangkan laporan dari Balitbang

Depdiknas mengenai kelayakan guru mengajar sekolah dasar tahun 2002-2003 menyatakan bahwa 45,2% guru tidak layak mengajar.

Majunya pendidikan suatu negara ditentukan oleh peran serta seorang pengajar atau guru. Tugas seorang guru ini tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu "Mencerdas kehidupan bangsa". Seseorang tidaklah bisa menjadi seorang yang sukses tanpa peran seorang guru yang telah terlebih dahulu memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan menjadi seorang yang sukses. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan profesionalisme guru yaitu dengan adanya pendidikan kilat (DIKLAT), seminar pendidikan dan lain lain.

Selain melaksanakan upaya peningkatan profesionalisme guru, pemerintah juga memberikan promosi kenaikan pangkat atau jabatan bagi guru yang memiliki prestasi kerja yang telah menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Kebijakan pemerintah dalam kenaikan pangkat ini diatur dalam PERMENPAN (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara) No.16 Tahun 2009,(Hans, 2001) yang berisikan mengenai jabatan fungsional dan angka kreditnya, kebijakan ini sebagai pedoman untuk proses kenaikan pangkat disetiap golongan, dimana memiliki tujuan membina karier dan profesionalisme guru agar mampu meningkatkan mutu pendidikan, sehingga menciptakan sumberdaya manusia yang produktif.

PERMENPAN yang membahas mengenai jabatan fungsional dan angka kreditnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan secara lebih adil akan profesionalisme seorang guru. Dengan demikian seorang guru yang mempunyai pangkat yang tinggi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pangkat guru yang berada pada tingkat bawah. Namun profesionalisme yang diharapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan tujuan. Banyak guru yang mempunyai pangkat yang lebih tinggi namun kualitasnya sama atau bahkan lebih baik dengan pangkat guru dibawahnya.

Kenaikan pangkat sendiri jika di implementasikan dari segi ekonomi memberikan segi positif bagi kesejahteraan guru, dimana dengan kenaikan pangkat merupakan bagian dari upaya menaikkan taraf hidup guru itu sendiri yang mana akan berimbas pada meningkatnya segi financial guru sehingga semakin meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dengan iming-iming tunjangan yang diberikan pemerintah diharapkan guru semakin bersemangat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk menjadi guru profesional.

Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Nganjuk mencatat bahwa kabupaten Nganjuk memiliki jumlah guru pangkat IVb sebanyak 1232. Namun banyaknya jumlah guru pangkat yang ada tidaklah terlepas dari praktek-praktek kecurangan yang menyertainya, misalnya saja dikabarkan di surat kabar Bela Bangsa daerah Nganjuk, memberitakan bahwasannya terdapat 269 orang

yang terindikasi menggunakan ijazah palsunya mendaftar CPNS. (Bela Bangsa, 2013: 02)

Rumusan masalah dari penelitian ini menjelaskan bagaimana praktek kecurangan kenaikan pangkat yang terjadi pada guru sekolah dasar negeri terutama yang mempunyai pangkat IVb di desa X (nama samaran) Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses kenaikan pangkat IVb dan mengetahui bagaimana proses kecurangan yang terjadi pada kenaikan pangkat khususnya pada pangkat IVb.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi kesadaran kolektif dimana agen ditempatkan pada posisi sadar dan rasional dalam bertindak namun disisi lain agen mampu bertindak berdasarkan kesadaran kolektif. (Berger, 2009: 102) seseorang mampu memerankan dirinya sebagai guru yang dianggap sebagai seorang yang digugu dan ditiru namun disisi lain mereka melakukan praktek kecurangan bersama temannya demi memperlancar proses kenaikan pangkat

Lokasi penelitian berada Desa X (nama desa yang telah disamarkan), Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. alasan pemilihan lokasi didasarkan pada observasi yang dilakukan sebelumnya, bahwa peneliti menjumpai oknum guru yang melakukan praktek kecurangan dengan menyuruh orang untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP). Pemilihan subyek menggunakan teknik *purposive*. (Koentjaraningrat, 1997: 108) Sedangkan untuk nama-nama dari subyek penelitian telah disamarkan, hal ini dilakukan untuk melindungi subyek, mengingat penelitian ini mengambil topik praktek kecurangan. Triangulasi dipakai sebagai teknik pengumpulan data melalui observasi tersamar ,wawancara mendalam (*Indept Interview*), dan dokumentasi.(Lexy J. Moleong, 2008: 186)

Analisis data dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Metode ini dapat ditempuh melalui beberapa langkah pertama, membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data hasil wawancara. Langkah kedua membandingkan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Langkah ketiga membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Langkah keempat, membandingkan perkataan subyek penelitian dengan tindakannya. Kemudian memulai dengan langkah penafsiran data yaitu: mengkritisi teori berdasarkan data yang ada kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strukturasi terbentuk dari adanya relasi-relasi atau hubungan dari perjumpaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang melintasi ruang dan waktu, sehingga terbentuklah praktik sosial didalam struktur.(Giddens, 2010: 26) Maksudnya seluruh aktivitas manusia tidaklah dihadirkan oleh mereka sendiri melainkan secara terus menerus diciptakan oleh para aktor sendiri melalui sarana

yang dimiliki. Praktik sosial inilah yang menjadi kajian utama dari teori strukturasi. Strukturasi Giddens dibagi menjadi 3 konsep, yaitu, signifikansi, dominasi dan legitimasi. Signifikansi menurut Giddens dijelaskan sebagai penandaan, simbolik atau wacana. Penandaan ini diberikan secara berulang-ulang dalam hal ini seperti penyebutan pengajar sebagai guru, sehingga penandaan yang diberikan terus melekat dikalangan masyarakat. Dalam konteks ini, signifikansi Giddens digunakan untuk menjelaskan pemaknaan guru sebagai bagian dari agen sekolah. Dari temuan data yang telah didapat terdapat tiga pandangan mengenai alasan seseorang memilih bekerja sebagai seorang guru diantaranya:

Guru Berjasa Besar

Kebanyakan orang menilai guru sebagai profesi yang mulia, dimana guru dipandang sebagai seorang yang sangat berjasa dalam bidang pendidikan. Berjasa maksudnya seseorang yang mempunyai sumbangsih yang besar terhadap perkembangan pendidikan, seperti guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan peranan yang penting dalam pendidikan terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Peran guru yang besar dalam pendidikan sehingga seseorang menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda balas jasa. ungkapan guru sebagai pahlawan tanpa balas jasa mempunyai signifikansi bahwasannya jasa guru yang sangat besar dalam bidang pendidikan baik dalam jerih payah ataupun pengorbanannya tidaklah dapat digantikan dengan balasan apapun atau tanpa pamrih. Sehingga guru tidak mendapatkan penghargaan apapun sedangkan pahlawan sendiri diartikan sebagai seseorang yang rela berkorban demi bangsa atau negaranya. Namun pernyataan yang diungkapkan oleh Mawar untuk sekarang ini tidaklah relevan meskipun sebenarnya gelar yang disematkan kepada seorang guru sebagai pahlawan tanpa balas jasa dapat dikatakan baik, namun faktanya untuk sekarang guru mendapatkan banyak tunjangan dari pemerintah. Masyarakat yang menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda balas jasa muncul karena hasil interaksi simbolis. Jadi seseorang dapat berinteraksi dengan sesama tidak hanya dengan gestur namun juga melalui symbol-simbol tertentu dari interaksi yang dihasilkan.

Guru Sebagai Panutan

Guru adalah seorang pendidik, maka guru adalah seseorang yang patut untuk ditiru atau orang jawa dalam istilah jawa sering disebut “*digugu lan ditiru*” signifikansi dari digugu lan ditiru sendiri sebagai tanda bahwa guru mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, dan tentunya berkelakuan baik. Ilmu pengetahuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Tingkah laku seorang gurupun haruslah diperhatikan karena guru seorang pendidik, tingkah laku dari seorang guru akan dapat mempengaruhi tingkahlaku dari siswa-siswi yang diajarnya.

Menjadi seorang guru dipandang sebagai pekerjaan yang baik dimana guru menjadi panutan setiap peserta didiknya. Meskipun banyak sekali berita mengenai kecurangan atau perilaku menyimpang yang dilakukan guru, penandaan guru sebagai panutan atau seorang yang digugu lan ditiru masih melekat dimasyarakat. terbukti semua subyek atau informan menyebut guru sebagai panutan.

Mendapat Pensiun

Menurut Arman pensiun merupakan bekal untuk hari tuanya, ketika beliau tidak lagi bekerja, setidaknya Arman masih mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya melalui uang pensiun.. Hal inilah yang menjadi latar belakang Arman memilih profesi guru sebagai pekerjaannya. Pekerjaan guru sebagai pegawai negeri sipil memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bekerja sebagai seorang guru, dimana seorang pegawai negeri pastinya akan mendapatkan pensiun dihari tua setelah masa jabatannya berakhir tentu sangat berbeda dengan bekerja dinon pemerintahan yang tidak akan mendapatkan pensiun dihari tua nanti. Oleh sebab itulah Arman melarang anaknya untuk bekerja dinon pemerintahan karena nantinya mereka tidak akan mendapatkan pensiun disaat jabatannya berakhir.

Signifikansi yang diberikan pada guru yang memiliki pensiun dihari tuanya nanti juga sama halnya seperti yang dijelaskan Melati. Melati berfikir dengan mendapatkan pensiun maka beliau dapat membantu keuangan keluarga. Ibu Melati berumur 50 tahun sedangkan, anak anaknya masih sekolah. melati menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya salah satunya mampu sekolah diperguruan tinggi, tentu tidaklah sedikit uang yang dikeluarkan untuk bisa masuk diperguruan tinggi. ditambah suami Melati bekerja diperusahaan swasta. Pensiun dari melati nantinyalah yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dominasi merupakan struktur kekuasaan yang dimiliki seseorang atas sumberdaya yang dimilikinya baik berupa sumberdaya autoritatif maupun sumberdaya alokatif untuk mendominasi seseorang yang lebih lemah (kurang memiliki sumberdaya). Dalam hal ini muncul suatu permasalahan baru bahwasannya kepala sekolah seringkali tidak lagi mau mengajar karena sudah terbebani oleh tugas sebagai seorang kepala sekolah yang dianggap sebagian kepala sekolah lebih berat. Tugas mengajar yang seharusnya dilaksanakan oleh kepala sekolah seringkali dialihkan kepada guru kelas, sehingga beban guru kelas semakin bertambah. lain halnya dengan Parjo, dan parman yang mengatakan masih jarang-jarang mengajarkan bahasa daerah kepada siswa kelas IV, V dan VI.

Pengalihan beban mengajar kepala sekolah kepada guru disebut sebagai struktur penguasaan atau Dominasi, penguasaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan terhadap yang lebih lemah. Sumberdaya yang dimiliki oleh kepala sekolah melalui kekuasaan yang dimilikinya memberikan peluang bagi dirinya untuk melakukan praktik sosial yang kurang baik. Jika

dipandang melalui aturan mengenai tugas guru dan kepala sekolah yang memiliki pembagian tugas masing-masing tentulah tidak adil bagi guru yang mendapat beban mengajar bahasa daerah oleh kepala sekolah. Dan jika perilaku ini dilaporkan kepada pihak pengawas tentulah akan mendapatkan suatu peringatan keras kepada kepala sekolah yang dapat mengancam jabatannya sebagai kepala sekolah. Namun disini kita melihat kekuatan atas sumberdaya yang dimiliki seorang kepala sekolah sehingga perbuatannya tidak diketahui oleh para pengawas sekolah. Guru yang mendapatkan beban mengajar tambahan dari kepala sekolah seringkali tidak diperbolehkan untuk berkata jujur atau merahasiakan permasalahan tersebut.

Guru dan kepala sekolah tidak jarang menyuruh guru sukuhun untuk membantu mereka menyelesaikan tugas pokok, seperti membantu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, atau bahkan membuat karya tulis ilmiah. Seruni menjelaskan bahwa beliau seringkali dibantu oleh guru sukuhun yang mengajar disekolahnya.

Tindakan seruni yang seringkali meminta bantuan kepada guru sukuhun ini tergolong dalam penggunaan dominasi, dimana dominasi menurut Giddens merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh agen dimana agen yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan agen lain (dalam hal ini guru sukuhun), maka agen/seruni memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kekuasaan menurut Giddens tidak hanya dipandang dari satu sisi saja, namun diperlukan penafsiran atas kekuasaan tersebut.

Serupa dengan Seruni Mawar sebagai kepala sekolah juga menggunakan dominasinya terhadap guru kelas, dapat dijelaskan dalam teori dominasi giddens bahwasannya Giddens membagi dominasi kedalam dua bentuk sumberdaya yang dimiliki oleh agen yaitu sumberdaya otoritatif dan sumberdaya alokatif. Seruni sebagai kepala sekolah mempunyai dua bentuk sumberdaya yang dijelaskan oleh Giddens diatas. Sumberdaya alokatif bisa berupa sumberdaya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui.

Contohnya seperti yang dilakukan mawar dalam memanfaatkan kepemilikan sumberdaya berupa emas yang dijual dan hasil dari penjualan dari emas tersebut digunakan sebagai biaya untuk membayar rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Tidak hanya emas yang digunakan untuk memperlancar kecurangan guru dalam kenaikan pangkat, namun juga atas kepemilikan toko barang kebutuhan rumah tangga dimana tersedia baik sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Seperti ; beras, air galon, kopi, gula, bensin, pupuk, gas elpiji dan lain sebagainya yang hasil dari penjualan barang-barang tersebut menurut arman dan mawar digunakan untuk memberikan upah kepada orang yang telah disuruh untuk membuat RPP atau karya tulis ilmiah. Arman juga mengatakan hal yang serupa bahwa hasil penjualan dari kelontong juga digunakan untuk keperluan pekerjaannya, dilaka gaji sebagai pegawai negeri sudah habis untuk keperluan sehari-hari.

Sedangkan sumber daya otoritatif yang Seruni miliki adalah kepemilikan kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan guru sukuhun mengakibatkan seruni atau guru yang lain yang mempunyai kepentingan dalam hal pembuatan RPP memanfaatkannya dengan memerintah guru sukuhun untuk membantu para guru mengerjakan tugas mereka seperti menyuruh untuk membuat RPP, sama halnya dengan kekuasaan atau dominasi yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang memiliki jabatan yang lebih tinggi maka kepala sekolah memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas yang belum sempat mereka kerjakan dikarenakan terlalu sibuk. Misalnya adalah menyuruh guru kelas terutama guru kelas IV,V dan VI untuk mengajar bahasa daerah dengan alasan beban kepala sekolah lebih berat dibandingkan guru kelas. Sumber daya otoritatif yang dilakukan oleh kepala sekolah dan juga guru lebih mengarah pada kekuasaan untuk memerintah seseorang yang memiliki jabatan yang lebih rendah dari kedua subyek tersebut yaitu kepala sekolah dan guru.

Anthony Giddens menjelaskan bahwa legitimasi merupakan suatu tanda atau bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi baik itu lisan maupun tertulis. Dimana struktur legitimasi merupakan struktur membenaran yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hingga dapat ditindak secara hukum. Jadi legitimasi merupakan hubungan saling mempengaruhi antara pemimpin dan yang dipimpin, maksudnya apakah masyarakat menerima atau mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak. Jika masyarakat menaruh kepercayaan dan menyetujui keputusan yang telah dibuat maka keputusan tersebut disebut legitimasi. Contohnya dengan disahkannya Permenpan No 16 tahun 2009 yang mengatur mengenai kenaikan pangkat.

Kenaikan pangkat guru saat ini berbeda dengan kenaikan pangkat tahun-tahun lalu yang dilakukan secara otomatis. Untuk saat ini pemerintah memberlakukan sistem angka kredit dimana dalam PERMENPAN (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara) No. 16 mengenai jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, maksudnya setiap guru yang menginginkan kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan berupa angka kredit yang telah dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian guru tidak lagi secara otomatis melaksanakan kenaikan pangkat empat tahunan. sehingga dimungkinkan cepat melaksanakan kenaikan pangkat. Angka kredit yang dimaksudkan dengan membuat karya tulis ilmiah minimal dua karya tulis ilmiah, mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, seminar, evaluasi pembelajaran, RPP dan Silabus, ijazah terakhir, dan berperan dalam sebuah organisasi sekolah.

Persyaratan dalam proses kenaikan pangkat IVb menurut para guru sedikit memberikan beban tersendiri dikarenakan calon guru kenaikan pangkat harus memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan dan membuat karya tulis ilmiah dimana dalam menulis karya ilmiah tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun terdapat juga guru yang tidak menjadikan

persyaratan kenaikan pangkat tersebut menjadi beban tersendiri. Sehingga dari persyaratan kenaikan pangkat ini dapat dibedakan menjadi dua praktek sosial yang dilakukan oleh guru diantaranya yaitu menyimpang dan tidak menyimpang.

Praktek Terstruktur

Proses kenaikan pangkat IVb yang dipandang rumit oleh sebagian orang ternyata tidak dipandang rumit oleh Parman yang telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat pada tahun 2012 dan sekarang tinggal menunggu surat ketetapan kenaikan pangkat dari pemerintah. Menurut Parman kenaikan pangkat IVb tidaklah dipandang terlalu rumit, Parman mampu mengerjakan semua persyaratan kenaikan pangkat sendiri meskipun seringkali harus bertanya kepada orang lain mengenai pembuatan beberapa persyaratan yang beliau belum mengerti, dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa Parman juga mendengar perilaku kecurangan dalam proses kenaikan pangkat namun tidak ingin membahasnya terlalu dalam.

Perilaku Parman ini termasuk dalam perilaku terstruktur maksudnya Parman mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak ingin melanggar peraturan tersebut karena Parman sadar kecurangan yang dilakukan akan membahayakan dirinya sendiri. meskipun seringkali dipengaruhi oleh guru yang telah melaksanakan kenaikan pangkat secara tidak benar namun menurut Parman, beliau hanya ingin mengerjakannya sendiri meskipun harus kembali belajar menggunakan komputer yang Parman katakan tidak terlalu mahir menggunakan komputer.

Menurut parman, beliau tidak ingin menyakiti hati orang lain dengan tidak ingin mendengarkan saran yang mereka sampaikan kepada parman. Parman lebih menghargai mereka dengan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Parman percaya dengan kemampuan yang dimilikinya meskipun pengetahuan yang beliau miliki masih kurang.

Struktur sendiri terdiri dari aturan dan sumberdaya. Dimana Parman telah mematuhi peraturan mengenai Permenpan No 16 tahun 2009 yang mengatur mengenai jabatan fungsional dan angka kreditnya. Dengan membuat persyaratan kenaikan pangkat sendiri. Parman menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan profesionalisme guru. diharapkan beliau menjadi seseorang yang diharapkan oleh pemerintah yaitu menjadi guru profesional. Parman mempercayai bahwa sumberdaya yang beliau miliki mampu untuk membuat persyaratan kenaikan pangkat yang dinilai sebagian guru dinilai terlalu sulit. Maka dengan hadirnya aturan dan sumberdaya yang dimiliki oleh Parman memberikan kesadaran bagi dirinya untuk tidak melakukan praktik sosial yang dapat melanggar peraturan.

Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang terjadi akibat adanya ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga terdapat individu-individu yang mengalami tekanan yang pada akhirnya

menjadi menyimpang.(Bagong, 2006) Menurut teori ini, individu memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan yang tertuang dalam Permenpan No 16 tahun 2009 mengenai jabatan fungsional dan angka kreditnya dimana guru harus melakukan kenaikan pangkat agar tunjangan yang didapatkan semakin besar tetapi oleh individu hal ini justru dianggap sebagai tekanan dalam hidupnya. Untuk mengatasi tekanan didalamnya, mereka memilih melakukan cara-cara yang nyaman bagi mereka, tetapi tidak lazim bagi masyarakat umum.

Robert K Merton melalui teori *Anomienya* menjelaskan pada dasarnya untuk memperoleh kesuksesan (tujuan hidup) diperlukan sebuah pengorbanan, seseorang harus memulainya dengan cara-cara yang sesuai prosedur, sesuai nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.(Ritzer, 2004: 273) Akan tetapi yang terjadi struktur sosial tidak mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang atau seluruh lapisan masyarakat untuk meraih tujuan yang diinginkan. Hanya lapisan-lapisan tertentu saja yang mampu menempati struktur sosial yang diinginkan secara sah. Perilaku menyimpang dalam proses kenaikan pangkat IVb dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara perilaku menyimpang yang ditempuh secara kolektif dan perilaku menyimpang yang dilakukan secara individual.

Perilaku Menyimpang Kolektif

Perolehan angka kredit dalam proses kenaikan pangkat dapat ditempuh dengan berbagai macam tugas yang telah menjadi tugas pokok seorang guru seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus, jurnal, pembimbing, dan sebagainya. Namun dari beberapa tugas tersebut menurut Melati, Seruni, dan Arman dilakukan secara berkelompok seperti yang dilakukan disaat mereka membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Proses pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dari diklat yang dilakukan oleh guru, dimana dalam setiap sekolah biasanya dikirim satu orang untuk mewakili sekolah. Dalam organisasi sekolah dibentuk gugus, atau pengelompokan dari beberapa sekolah yang mempunyai lokasi berdekatan. Disini Melati, Arman Dan Seruni bergabung di gugus IV bersama dengan guru dari IV sekolah dasar yang berbeda. Setelah melaksanakan diklat mereka selalu membentuk kelompok kerja guru (KKG) yang dimaksudkan untuk memusyawarahkan atau mengulas kembali pengetahuan yang diperoleh dari pelaksanaan Diklat yang sudah dilaksanakan. Selain itu menurut Seruni didalam KKG juga dilaksanakan pembuatan rencana pembelajaran (RPP) bersama.

Hadirnya KKG guru tidak perlu membuat RPP sendiri, hal ini sedikit meringankan tugas dari guru. RPP yang dibuat dalam KKG dapat digunakan dalam beberapa semester. Guru yang menggunakan RPP tersebut hanya tinggal mengubah tanggal, bulan dan tahun berlakunya RPP tersebut, sehingga dapat digunakan berulang kali. Arman merasa diuntungkan dengan hadirnya KKG menurutnya hadirnya KKG mengurangi bebannya dalam membuat RPP karena dilain sisi Arman memiliki pekerjaan lain selain menjadi guru.

Pembuatan RPP seharusnya menjadi tugas pribadi guru, dimana tugas ini harusnya dikerjakan sendiri oleh

guru yang bersangkutan. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pengawas sekolah memberikan celah bagi para guru yang mengikuti KKG untuk melakukan praktik menyimpang bersama guru lainnya. Demi mengurangi beban kerja guru seseorang akan melakukan penyimpangan, dimana penyimpangan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Telah dijelaskan dalam undang-undang guru dan dosen bahwa guru haruslah bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya diantaranya adalah membuat rencana pembelajaran yang bermutu tidak dengan asal membuat dengan hanya mengubah tanggal, bulan dan tahun dari rencana pembelajaran sebelumnya. Jika ditelaah kegiatan para guru dalam kelompok kerja guru terdapat segi positif dan segi negatifnya dimana kegiatan yang seharusnya dilakukan berupa saling mendiskusikan pengetahuan yang telah didapat dari pendidikan kilat (Diklat) namun disisi lain juga melakukan penyimpangan berupa pembuatan rencana pembelajaran secara kolektif.

Meskipun pembuatan rencana pembelajaran dinilai menguntungkan bagi para guru yang memanfaatkan kegiatan tersebut namun pembuatan rencana pembelajaran atau disebut juga sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara kolektif dinilai salah karena dengan seperti ini itu negara kita tidak akan memiliki tenaga profesional namun semakin membuat pendidikan di negara kita semakin terpuruk.

Namun karena kurangnya perhatian dari pengawas sekolah mengenai kelompok kerja guru semakin lama semakin ditinggalkan oleh para guru. Hal ini dikarenakan para guru mempunyai pekerjaan lain sehingga malas mengikuti kelompok kerja guru yang dilakukan setelah melaksanakan diklat. Selain itu hadirnya seseorang yang menawarkan jasa pembuatan RPP juga memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan kegiatan kelompok kerja ini.

Perilaku Menyimpang Individu

Kenaikan pangkat secara individu maksudnya seseorang melaksanakan proses kenaikan pangkat IVb dengan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat secara individu namun tidak juga terlepas dari campur tangan pihak lain akan tetapi tidak ada orang yang mengetahui praktik kecurangan yang dilakukan selain kedua pihak yang membuat kecurangan tersebut. Perbedaannya kenaikan pangkat yang ditempuh secara kolektif dengan cara membuat RPP dalam KKG yang dilakukan oleh para guru dimana RPP yang dibuat atas persetujuan dari kelompok atau beberapa orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan dengan tujuan untuk meringankan tugas mereka sebagai seorang guru mereka melakukan pembuatan RPP secara kolektif berbeda dengan pembuatan RPP individu, seorang guru membuat RPP atas bantuan orang lain yang sudah dibayar namun menyuruh pembuat RPP untuk merahasiakan kecurangan yang dilakukan. Jadi perbedaan yang nampak adalah jika dalam KKG kecurangan bersifat kelompok namun dalam kecurangan individu hanya melibatkan dua orang yaitu guru dan pembuat RPP.

Praktik lain yang dilakukan guru seperti menyuruh orang membuat karya tulis ilmiah, dan evaluasi pembelajaran. Praktik kecurangan yang dilakukan oleh para guru kenaikan pangkat ini juga dipengaruhi oleh orang lain karena perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan melintasi ruang dan waktu mengakibatkan oknum guru pangkat tersebut mempunyai kesadaran kolektif seperti yang dikatakan oleh Peter L Berger bahwa agen mampu bertindak sebagai sebagai seorang aktif dan rasional namun juga mampu bertindak berdasarkan kesadaran kolektif, merujuk dari teori Berger bahwa agen mampu bertindak rasional disini adalah oknum guru pangkat sadar bahwa dirinya tidak mempunyai keahlian dalam membuat karya tulis ilmiah dan kurang mampu menguasai teknologi computer maka oknum guru pangkat tersebut menyuruh orang untuk membuat beberapa persyaratan kenaikan pangkat dimana persyaratan tersebut tentulah tidak mungkin jika dilakukan dengan mesin ketik. Karena dari keenam informan yang peneliti wawancarai, semua informan mengaku tidak mampu mengoperasikan Komputer. Keterbatasan inilah yang membuat mereka menggunakan jasa orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Praktik kecurangan yang dilakukan oleh para oknum guru pangkat dengan menyuruh orang untuk membuat beberapa persyaratan dalam kenaikan pangkat dapat melanggar PERMENPAN No. 16 Tahun 2009 mengenai jabatan fungsional dan angka kreditnya. Sesuai dengan pemikiran Anthony Giddens bahwasannya terdapat Legitimasi dalam sebuah strukturasi dimana Legitimasi tersebut berlaku ketika agen mulai melakukan praktik-praktik sosial yang melanggar hukum. Dalam strukturasi kekuatan legitimasi yang dimaksud bersifat mengontrol setiap praktik sosial yang dilakukan oleh para agen namun tidak terlalu mengekang seperti berkaitan dengan nilai dan norma dalam pemikiran Durkheim yang bersifat mengekang. Pelanggaran atas norma dalam legitimasi tentulah akan mendapatkan sanksi, dan sanksi yang diberikan dalam proses kenaikan pangkat berupa penundaan kenaikan jabatan.

Namun atas kekuasaan yang dimiliki oleh para oknum guru pangkat penundaan kenaikan pangkat tidaklah terjadi dikarenakan pemanfaatan sumberdaya alokatif yang agen atau oknum guru pangkat miliki. Dengan sumberdaya alokatif tersebut maka agen dapat menggunakannya untuk meyuap para pihak yang terkait atas penundaan jabatan yang diberlakukan kepada agen. Disinilah strukturasi berlaku ketika diantara aturan dan sumberdaya saling berkaitan atau saling menjembadani meskipun terkadang komunikasi yang dilakukan antara aturan dan sumberdaya tidaklah mengarah kearah yang baik seperti dalam penelitian ini yang justru mengarah kehal yang negatif dimana sumberdaya dapat membeli suatu aturan yang berlaku. Dominasi guru dalam sumberdaya alokatif membuat praktik kecurangan yang dilakukan menjadi legal karena adanya kesepakatan bersama untuk merahasiakan perbuatan yang dialakukan antara pelaku kecurangan kenaikan pangkat dalam hal ini guru dan pengawas sekolah, sehingga kenaikan pangkat dapat berjalan lancar sesuai keinginan dari guru tersebut.

Praktek kecurangan kenaikan pangkat berlangsung disaat para agen memproduksi peraturan yang dibuat oleh pemerintah kemudian direproduksi kembali dalam bentuk kecurangan atau praktik sosial yang melibatkan pembentukan relasi-relasi dalam hal ini hadirnya dukungan dari pihak lain yang melakukan kecurangan yang memberikan pengaruh untuk melakukan kecurangan, baik kecurangan yang dilakukan secara kolektif ataupun kecurangan yang dilakukan secara individu. Dimana praktik kecurangan kenaikan pangkat ini berlangsung secara terus menerus melintasi ruang dan waktu hingga membentuk dualitas sosial.

Relasi-relasi dalam praktek kecurangan kenaikan pangkat mulai terbentuk dari perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan diantara agen hingga menghasilkan interaksi. Interaksi ini berlangsung terus-menerus selama agen atau pelaku kecurangan kenaikan pangkat masih membutuhkan informasi dan bantuan dari agen yang lain. Perjumpaan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk Kelompok Kerja Guru, guru dalam satu sekolah ataupun dari luar sekolah.

PENUTUP

A. Simpulan

Proses kenaikan pangkat dimulai dari *Pertama*, pengajuan daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) oleh guru yang mengajukan kenaikan pangkat kepada kepala sekolah. *Kedua*, penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari pihak Depdikbud. *Ketiga*, memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai DUPAK kenaikan pangkat guru sekolah dasar berdasar pada golongan masing-masing. *Keempat*, Menyerahkan dokumen persyaratan kenaikan pangkat ke koordinator pengawas sekolah (PS) UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk diajukan ketingkat provinsi. *Kelima*, hasil penilaian diajukan kepada badan Administrasi kepegawaian Negara (BAKN) yang mana badan ini berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengeluaran Surat Keputusan (SK) kepangkatan. Dan *Keenam*, hasil dari proses penilaian yang berupa SK kepangkatan selanjutnya akan dikirimkan kepada guru yang telah lulus dalam memenuhi persyaratan kenaikan pangkat.

Proses kenaikan pangkat tidaklah sulit jika guru aktif dalam menjalankan tugasnya. Namun karena beberapa alasan seperti sibuk mengajar, membuka usaha lain, dan mengurus keluarga yang akhirnya mereka lalai menjalankan tugasnya. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat, mereka menggunakan praktik-praktik sosial seperti menyuruh orang membuatkan rencana pelaksanaan pembelajaran, karya tulis ilmiah dan evaluasi pembelajaran. praktik ini biasanya dilakukan secara berkelompok/kolektif seperti membuat rencana pembelajaran melalui forum kelompok kerja guru atau bisa dilakukan secara individu dengan membayar orang dan menyuruhnya membuatkan rencana pelaksanaan pembelajaran, karya tulis ilmiah dan evaluasi pembelajaran. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan guru tentang makna profesi guru bagi mereka yang menyatakan guru sebagai panutan. Tentunya praktik

kecurangan yang dilakukan oleh oknum guru tidaklah cocok sebagai panutan.

B. Saran

penelitian ini hanya terfokus pada kenaikan pangkat golongan IVb pada guru sekolah dasar, oleh karena itu penelitian yang sejenis diharapkan perlu mempertimbangkan pada kenaikan pangkat pada golongan lainnya atau mungkin mengubah subyek penelitiannya menjadi guru sekolah menengah pertama, guru sekolah menengah atas, perguruan tinggi atau kenaikan pangkat pada pegawai negeri lainnya.

Daftar Pustaka

- Bangsa, Bela. Senin 4 maret 2013. *Maraknya Ijash Palsu*
- Giddens, Anthony. 2010. *TEORI STRUKTURASI: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hans. 2001. *Kenaikan Pangkat Guru Berdasarkan Permenpan No. 16 Tahun 2009*. (online) <http://mashantu.wordpress.com/2011/05/23/kenikan-pangkat-guru-berdasarkan-permenpan-no-16-tahun-2009/>. Diakses pada 31 Januari 2012.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kunandar. 2011. *Guru profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Maleong, J, Lexi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi, J, Bagong. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Priyono, B, Herry. 2002. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, George et all. 2009. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Riyanto, Geger. 2009. *Peter L Berger, Persepektif Metateori pemikiran*. Jakarta : LP3ES
- Undang-Undang Dasar 1945. (online). www.bappenas.go.id/get-file-server/node/85/ diakses 30 Januari 2012